

Pro Kontra Pemberhentian Pegawai Honorer Pemkab Pangandaran

Anton Atong Sugandhi - PANGANDARAN.INDONESIASATU.CO.ID

May 7, 2021 - 05:37



PANGANDARAN JAWA BARAT - Terkait Pemberhentian Tenaga Pegawai Honorer di Pangandaran, kini telah menuai Pro dan kontra dimasyarakat, dimana kebijakan pemerintah terhadap pegawai Non ASN diduga kurang adanya transparasi.

Akibat dari penghentian sepihak pegawai non ASN ini telah menimbulkan bertambahnya angka pengangguran di Pangandaran, maka, dalam hal ini DPRD

Pangandaran Melalui Ketua DPRD angkat bicara.

Asep Noordin Ketua DPRD Pangandaran mengatakan kebijakan pemerintah tentang Pemutusan kontrak kerja pegawai non ASN tak perlu dipertentangkan, ya karena hal itu sepenuhnya menjadi urusan pemerintah.

Contoh di salah satu SKPD, beban kerjanya itu seperti apa dan berapa sih tenaga kerja yang di butuhkan, tentu itulah yang jadi ukurannya, " ujar Asep Nurdin saat dikonfirmasi oleh beberapa awak media diruang kerjanya, Jum'at (07/05/2021)

Dikatakan Asep bahwa, pemerintah sedang melakukan reformasi birokrasi yang efektif dan efisien sehingga seluruh kegiatan di masing masing OPD bisa berjalan dengan baik.

Awal mula rekrutmen tenaga kerja ini, saya melihatnya itu dimulai dari DOB kita, nah di sini kan ada pemerintahnya namun waktu itu kan belum ada DPRD, " katanya.

DPRD kabupaten Pangandaran ini kan berdiri tahun 2014 akhir, dan saya pun waktu itu kebetulan jadi Anggota DPRD.

Begitu kami masuk kerja, pegawai non PNS sudah cukup banyak, waktu itu saya gak ngerti, seperti apa pola rekrutmen pegawai non PNS, sehingga terjadi over load seperti sekarang ini.

Selanjutnya, persoalan keuangan daerah, dengan adanya pandemi covid 19 yang tak kunjung selesai, itu juga berpengaruh terhadap kebijakan anggaran, " jelasnya.

Sebetulnya memang dilematis sih, ya, di satu sisi bagaimana keinginan pengangguran masyarakat bisa terakomodir, namun di sisi lain, keadaan keuangan daerah pun sangat berpengaruh.

Maka, dengan adanya pandemi covid-19 seperti sekarang ini, kedepan saya sangat berharap agar proses rekrutmen harus lebih baik, harus betul-betul ada uji kompetensi, " imbuhnya

Semoga kondisi ekonomi masyarakat cepat pulih kembali, baik ekonomi di kabupaten Pangandaran maupun secara nasional,

" Ya, karena dengan pulihnya perekonomian masyarakat, itu jelas akan berdampak pada keuangan daerah.

Saya yakin kalau kondisi keuangan daerah sudah mumpuni, disitu akan ada ruang yang mana tenaga kerjapun akan terbuka kembali, " tegas Asep.

Untuk itu kita juga do'akan agar ade-ade, dan sahabat-sahabat yang sekarang diberhentikan kontrak kerjanya, mudah-mudahan secepatnya dapat pekerjaan yang lebih baik dari sebelumnya.

Hidup ini kan tidak bisa di diduga, siapa tahu dengan jalan seperti itu ada pekerjaan dan jabatan yang lebih baik sehingga mendapatkan kehidupan yang

lebih layak serta bermanfaat, " tandasnya. (Anton AS)